

Faktor Penentu Transaksi Pihak Berelasi: Struktur Kepemilikan dan Tingkat Pengungkapan

Nur Astri Sari¹ dan Budi Artinah²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
Jl. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin 70123, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin
Jl. H. Hasan Basry No. 9-11 Kayutangi Banjarmasin 70123, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Ownership concentration;
Ownership structure; Related
party transaction disclosure;
Related party transaction
disclosure

Abstract

The objective of this study examines the effect of ownership structure and related party transaction disclosure to the size of related party transaction on companies included in LQ45 index in Indonesia Stock Exchange for the period 2016. This study is using disclosure guidelines from OJK Regulation No VIII.G.7 and PSAK 7 (Adjustment 2015). The result shows that related party transaction disclosure has no significant effect on related party transactions. On the other hand, concentrated ownership has a significant positive effect on related party transactions. It shows that concentrated ownership can lead to agency conflicts between majority and minority shareholders through the practice of related party transactions.

✉ Corresponding Author:
Budi Artinah:
Tel. /Fax. (0511) 3304652
E-mail: -

© 2018 STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved. Peer review under responsibility of STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda-beda. La Porta, *et.al.* (1998) menemukan bahwa struktur kepemilikan perusahaan di negara berkembang sangat terkonsentrasi, sedangkan di negara maju struktur kepemilikan relatif tersebar. Untuk perusahaan publik di Indonesia sendiri, struktur kepemilikan masih terkonsentrasi (*ownership concentration*) pada kepemilikan keluarga (Arifin, 2003; Prasetyo, 2103) *Ownership concentration* ditunjukkan dengan adanya kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi pada satu atau beberapa pihak (Lestari dan Murtanto, 2017)

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi di Indonesia menimbulkan permasalahan keagenan antara pemegang saham pengendali (mayoritas) dengan pemegang sa-

ham non pengendali (minoritas). Pemegang saham pengendali memiliki potensi untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan dan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai operasi bisnis dibandingkan dengan pemegang saham minoritas (Utama, 2008). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi bisa menimbulkan terjadinya transaksi yang merugikan bagi pemegang saham minoritas. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi pihak berelasi (*related party transaction*).

Transaksi pihak berelasi umumnya dilakukan oleh direksi atau pemegang saham pengendali dengan afiliasinya, dengan menggunakan wewenang untuk mempengaruhi kondisi transaksi agar sesuai dengan tujuan pribadi mereka. Kohlbeck dan Mayhew (2010) menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi

transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan (*abusive related party transaction*) atau menguntungkan (*efficient related party transaction*). Chang dan Hong (2000) menemukan bahwa perusahaan terafiliasi dalam satu kelompok bisnis dapat menggunakan sumber daya berwujud (*tangible resources*) dan tidak berwujud (*intangible resources*) secara bersama-sama sehingga dapat memperoleh manfaat *economies of scale* dan *economies of scope*. Hal ini menunjukkan transaksi pihak berelasi yang *efficient* karena memberikan keuntungan bagi seluruh pemegang saham. Dilain sisi, *abusive related party transaction* merupakan transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk mengambil keuntungan atau kas dari pemegang saham minoritas melalui *tunneling activities*.

Dalam rangka menghindari dan meminimalisasi transaksi pihak berelasi yang bisa merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, khususnya pada bagian transaksi dengan pihak berelasi. Selain itu, DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) juga telah mengeluarkan PSAK 7 (Penyesuaian 2015) yang mengatur tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai pihak-pihak yang berelasi dengan perusahaan, seperti pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya, Hwang, *et.al.* (2010) menemukan bahwa semakin tinggi transparansi yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan terjadinya *abusive related party transaction*. Dilain sisi, Utama & Utama (2014) dan Utama (2015) menemukan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi akan meningkatkan transaksi pihak berelasi yang cenderung bersifat efisien. Yeh *et.al.* (2012) menemukan bahwa struktur kepe-

milikan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya transaksi pihak berelasi. Selanjutnya, Kang, *et.al.* (2014) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi semakin meningkat seiring dengan peningkatan hak suara (*voting rights*). Selain itu, Utama (2015) juga menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi yang *abusive*.

Teori keagenan membahas mengenai hubungan antara dua pihak, satu pihak (*agent*) setuju untuk melakukan sesuatu sebagai representasi dari pihak lain (*principal*) (Schroeder, *et.al.*, 2009). Asumsi yang digunakan dalam teori keagenan adalah setiap individu akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu, hubungan keagenan akan menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik keagenan.

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menimbulkan konflik keagenan. Pemegang saham pengendali memiliki potensi untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan dan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai operasi bisnis dibandingkan dengan pemegang saham minoritas (Utama, 2008). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi tersebut cenderung menyebabkan pergeseran konflik keagenan, yaitu dari konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham menjadi konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali bersama-sama dengan manajemen dengan pemegang saham minoritas (Vilalonga dan Amit, 2006).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (PSAK 7). Adanya transaksi pihak berelasi memungkinkan terjadinya kesepakatan yang tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Adanya hubungan istimewa bisa mempengaruhi transaksi, saldo, dan komitmen antar entitas yang bertransaksi.

Pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor yang menyiapkan laporan

keuangannya. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika: (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; (b) Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau (c) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Adanya *ownership concentration* bisa menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Erickson, *et.al.*, 2005 dan Jara & Lopez, 2008). Para pemegang saham mayoritas bisa menggunakan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya dengan mengekspropriasi pemegang saham minoritas. Dengan demikian, *ownership concentration* meningkatkan biaya keagenan yang terkait dengan ekspropriasi hak pemegang saham minoritas (Chirinko, *et.al.*, 2005).

Pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk mengekspropriasi pemegang saham minoritas dengan kemampuannya mengakses informasi secara langsung ke perusahaan. Ketidaksamaan informasi yang dimiliki pemegang saham mayoritas dan minoritas bisa menimbulkan asimetri informasi antar pemegang saham. Myers and Majluf (1984) menyebutkan bahwa asimetri informasi bisa meningkatkan biaya modal. Peningkatan biaya modal tersebut akan menyebabkan turunnya harga saham perusahaan, sehingga untuk mengurangi asimetri informasi antar pemegang saham, pemegang saham mayoritas harus menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dengan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi (Nuryaman, 2009). Nuryaman (2009) menemukan adanya hubungan positif antara *ownership concentration* dengan pengungkapan sukarela. Haniffa & Cooke (2003) dan Mohd & Shamsul (2005) juga mengungkapkan bahwa untuk mengurangi asimetri informasi, pemegang saham mayoritas akan meningkatkan pengungkapan informasi untuk memelihara kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

PSAK 7 menyebutkan bahwa jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak

berelasi dalam satu periode maka entitas mengungkapkan beberapa item terkait transaksi pihak berelasi tersebut. Selain dalam PSAK, pengungkapan mengenai transaksi pihak berelasi juga diwajibkan oleh OJK melalui Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Indikator pengungkapan transaksi pihak berelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Perusahaan memberikan perincian jumlah aktiva, kewajiban, penjualan, dan pembelian RPT; (b) Perusahaan memberikan nilai persentase pada poin (1) terhadap total aktiva, kewajiban, penjualan dan pembelian; (c) Perusahaan memisahkan nilai RPT > Rp 1 Milyar, menyebutkan nama dan hubungan pihak tersebut; (d) Perusahaan memberikan penjelasan transaksi RPT yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama perusahaan; (e) Perusahaan memberikan nilai utang/piutang dari RPT yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama perusahaan; (f) Perusahaan menyebutkan sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi; (g) Perusahaan memberikan keterangan tentang kebijakan harga RPT; (h) Perusahaan memberikan keterangan tentang syarat transaksi, termasuk komitmen dan persyaratan terkait dan rincian jaminan; (i) Apakah kebijakan dan syarat sama dengan transaksi pada pihak ketiga; (j) Perusahaan membuat alasan dan dasar pembentukan penyisihan piutang hubungan istimewa; dan (k) Beban yang diakui selama periode atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang pihak berelasi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ditemukan bahwa semakin tinggi *voting rights* semakin tinggi transaksi pihak berelasi (Kang, *et.al.*, 2014). Secara umum, Kang, *et.al.* (2014) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi terjadi ketika masalah keagenan semakin besar dan digunakan sebagai mekanisme *tunneling* sehingga menurunkan nilai perusahaan. Claessens, *et.al.* (2002) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan pada rentang tertentu dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (*alignment effect*), tetapi jika melewati batas

tertentu dapat merugikan pemegang saham minoritas (*entrenchment effect*). Selain itu, Utama (2015) juga menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi yang *abusive*.

Hasil penelitian yang terkait dengan hubungan pengungkapan transaksi pihak berelasi dengan transaksi pihak berelasi masih menunjukkan hasil yang beragam. Hwang, *et.al.*, (2010) menemukan bahwa semakin tinggi transparansi yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah kecenderungan terjadinya *abusive related party transaction*. Dilain sisi, Utama & Utama (2014) dan Utama (2015) menemukan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi berhubungan positif dengan transaksi pihak berelasi, tetapi transaksi pihak berelasi yang terjadi cenderung bersifat efisien.

Berdasarkan latar belakang adanya praktik transaksi pihak berelasi yang bersifat *abusive* dan *efficient* tersebut, maka penelitian mengenai transaksi pihak berelasi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Utama (2015). Namun penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda dengan Utama (2015) dalam penilaian pengungkapan transaksi pihak berelasi. Utama (2015) hanya menggunakan indikator pengungkapan dari Peraturan OJK Nomor VIII.G.7, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator dari Peraturan OJK Nomor VIII.G.7 dan PSAK 7 (Penyesuaian 2015).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai: (1) Pengaruh struktur kepemilikan berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi. (2) Pengaruh tingkat pengungkapan pihak berelasi berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi.

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi di Indonesia bisa menimbulkan terjadinya konflik keagenan antara pemegang saham pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas bisa

menggunakan informasi yang dimilikinya untuk melakukan transaksi pihak berelasi dengan mengekspropriasi kepentingan pemegang saham minoritas. Hasil penelitian yang dilakukan Yeh, *et.al.* (2012) menemukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh pada kemungkinan terjadinya transaksi pihak berelasi. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Kang, *et.al.* (2014) dan Utama (2015) yang menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi. Dengan demikian, diduga bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Akibatnya, konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi yang bersifat *abusive*.

H₁ : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi

Sesuai dengan PSAK dan Peraturan OJK Nomor VIII.G.7, setiap perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan. Pengungkapan transaksi pihak berelasi merupakan media untuk mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pelaporan dan pengungkapan transaksi pihak berelasi meliputi jumlah aset, liabilitas, penjualan, dan beban yang dilakukan perusahaan atas dasar transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Hwang, *et.al.* (2010) menemukan bahwa semakin tinggi transparansi yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah kecenderungan terjadinya *abusive related party transaction*. Dilain sisi, Utama & Utama (2014) dan Utama (2015) menemukan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi akan meningkatkan transaksi pihak berelasi yang cenderung bersifat efisien. Dengan demikian, sesuai dengan penelitian Hwang, *et.al.*, (2010) diduga bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi bisa

menurunkan terjadi transaksi pihak berelasi yang bersifat *abusive*.

H₂: Pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi

3. METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi transaksi pihak berelasi sebagai variabel terikat, dan struktur kepemilikan, Pengungkapan transaksi pihak berelasi dan jenis industri sebagai variabel bebas. Operasionalisasi variabel disajikan pada Tabel 1. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masuk dalam indeks LQ45. Periode penelitian adalah tahun 2016. Pemilihan sampel menggunakan *purposive-sampling* dengan kriteria: 1) Memiliki laporan keuangan

untuk tahun 2016; 2) Perusahaan memiliki data terkait transaksi pihak berelasi. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan sebesar 45 sampel untuk model RPTAL dan 37 sampel untuk model RPTSE.

Data yang digunakan dalam penelitian didapatkan melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs perusahaan sampel penelitian. Selanjutnya, analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan model *cross sectional*. Perhitungan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan program SPSS.

Untuk menguji hipotesis H₁ dan H₂ digunakan model persamaan regresi berikut ini:

$$RPT = \alpha_0 + \alpha_1 OWN + \alpha_2 DISC + \alpha_3 IND + \varepsilon.$$

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Keterangan | Pengukuran |
|----------|---------------------------------------|--|
| RPT | Transaksi pihak berelasi | $RPTAL = \frac{RPTA + RPTL}{Ekuitas}$ $RPTSE = \frac{RPTS + RPTE}{Ekuitas}$ <p>RPTAL: transaksi pihak berelasi aset dan liabilitas; RPTSE: transaksi pihak berelasi pendapatan dan beban; RPTA: jumlah aset terkait pihak berelasi; RPTL: jumlah liabilitas terkait pihak berelasi; RPTS: jumlah pendapatan terkait pihak berelasi; RPTE: jumlah beban terkait pihak berelasi dan Ekuitas: total ekuitas</p> |
| OWN | Struktur kepemilikan | Persentase kepemilikan saham terbesar |
| DISC | Pengungkapan transaksi pihak berelasi | Jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi 11 indikator pengungkapan transaksi pihak berelasi. |
| IND | Jenis industri | 1: perusahaan berada dalam <i>regulated industry</i> dan 0: tidak. |

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 2, maka analisis untuk hipotesis H₁ dan H₂ adalah:

Struktur Kepemilikan

a. Model RPTAL

Koefisien regresi OWN adalah 0,6513048 dengan tingkat signifikansi

sebesar 0,085. Dengan tingkat keyakinan 90%, konsentrasi kepemilikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap besaran transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas.

b. Model RPTSE

Koefisien regresi OWN adalah 0,9041587 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009. Dengan tingkat keyakinan

99%, konsentrasi kepemilikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap besaran transaksi pihak berelasi terkait pendapatan dan beban.

Berdasarkan hasil kedua pengujian di atas, dapat disimpulkan hipotesis H₁ diterima bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penemuan Yeh, *et.al.* (2012), Kang, *et.al.* (2014), dan Utama (2015). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi di Indonesia bisa menimbulkan terjadinya konflik keagenan antara pemegang saham pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham

mayoritas bisa menggunakan informasi yang dimilikinya untuk melakukan transaksi pihak berelasi dengan mengekspropriasi kepentingan pemegang saham minoritas.

Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

a. Model RPTAL

Koefisien regresi DISC sebesar -0,042442 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,961. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak signifikan mempengaruhi besaran transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas.

Tabel 2. Hasil Regresi

| Variabel | Koefisien | Robust Std, Error | t-stat | Prob, |
|------------------|------------|-------------------|--------|----------|
| RPTAL | | | | |
| <i>Intercept</i> | 0,0038387 | 0,3488958 | 0,01 | 0,991 |
| OWN | 0,6513048 | 0,3692115 | 1,76 | 0,085* |
| DISC | -0,042442 | 0,872178 | -0,05 | 0,961 |
| IND | 1,975071 | 0,8095872 | 2,44 | 0,019** |
| R ² | 0,4494 | | | |
| F-stat | 5,44 | | | |
| Prob F | 0,0030*** | | | |
| RPTSE | | | | |
| <i>Intercept</i> | -0,1702399 | 0,3634666 | -0,47 | 0,643 |
| OWN | 0,9041587 | 0,3270418 | 2,76 | 0,009*** |
| DISC | -0,0169801 | 0,6669294 | -0,03 | 0,980 |
| IND | -0,233934 | 0,0950494 | -2,46 | 0,019** |
| R ² | 0,2175 | | | |
| F-stat | 2,96 | | | |
| Prob F | 0,0467** | | | |

* signifikan pada $\alpha = 10\%$, ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, dan *** signifikan pada $\alpha = 1\%$.

b. Model RPTSE

Koefisien regresi DISC adalah -0,01698 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,980. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak signifikan mempengaruhi besaran transaksi pihak berelasi terkait pendapatan dan beban.

Berdasarkan hasil kedua pengujian di atas, dapat disimpulkan hipotesis H₂ ditolak. Pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi pihak berelasi. Jika dilihat dari indeks pengungkapan transaksi pihak berelasi, rata-rata indeks pengungkapan baik dalam model RPTAL dan RPTSE masih cukup rendah

yakni hanya sekitar 45%. Rendahnya indeks pengungkapan transaksi pihak berelasi ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan perusahaan belum sepenuhnya mempertimbangkan pengungkapan transaksi pihak berelasi terhadap besaran transaksi pihak berelasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penemuan Yeh, *et.al.* (2012), Kang, *et.al.* (2014), dan

Utama (2015). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi di Indonesia bisa menimbulkan terjadinya konflik keagenan antara pemegang saham pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas bisa menggunakan informasi yang dimilikinya untuk melakukan transaksi pihak berelasi yang *abusive* dengan mengekspropriasi kepentingan pemegang saham minoritas.

Pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi pihak berelasi. Jika dilihat dari indeks pengungkapan transaksi pihak berelasi, rata-rata indeks pengungkapan baik dalam model RPTAL dan RPTSE masih cukup rendah yakni hanya sekitar 45%. Rendahnya indeks pengungkapan ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan perusahaan belum sepenuhnya mempertimbangkan pengungkapan transaksi pihak berelasi terhadap besaran transaksi pihak berelasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan, antara lain kepada, yaitu untuk regulator dapat melakukan perbaikan regulasi atau standar terkait pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi mendorong perusahaan untuk melakukan transaksi pihak berelasi. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi cenderung melakukan transaksi pihak berelasi. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait transaksi pihak berelasi agar tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Penelitian ini masih terbatas periode penelitian dan variable yang digunakan untuk memprediksi transaksis yang berelasi. Untuk penelitian selanjutnya dapat dil-

akukan dengan memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih akurat serta memperbanyak sampel penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. 2003. Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. *Disertasi*, Pascasarjana FEUI.
- Chang, S. dan J. Hong. 2000. Economic Performance of Group-affiliated Companies in Korea: Intergroup Resource Sharing and Internal Business Transactions. *Academy of Managerial Journal*. 43 (3). 429-448.
- Chirinko, Robert S., Ees, Hans Van., Garretsen, Harry., & Sterken, Elmer. 2003. Investor protections and concentrated ownership: Assessing corporate control mechanisms in the Netherlands. *CESifo working paper No 864*.
- Claessens, S., S. Djankov, J. P. H. Fan, dan L. H. P. Lang. 2002. Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings. *The Journal of Finance*. 57 (6). 2741-2771.
- Erickson, J., Park, Yun W., Reising, J., dan Shin, Hyun-Han. 2005. Board composition and firm value under concentrated ownership: The Canadian evidence. *Pacific-Basin Finance Journal*. 13. 387-410.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Haniffa, R.M & T.E Cooke. 2002. Culture, corporate governance, and disclosure in Malaysian corporation. *ABACUS*. 38 (3).
- Hwang, C. Y., S. Zhang, dan Y. Zhu. 2010. *Related Party Transactions in China Before and After the Share Structure Reform*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2017*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jara, M. & Lopez, Felix J. 2008. *Earnings management and internal control mechanisms: Evidence from Chilean firms*.

- Johnson, M. & Meckling W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structures. *Journal of Financial Economics*. p 308.
- Kang, M., Lee, H.Y., Lee, M.G., & Park, J.C. 2014. The Association between Related-Party Transaction and Control-Ownership Wedge: Evidence from Korea. *Pacific-Basin Finance Journal*. 29. 272-296.
- Keown, Arthur J., Martin, John D., Petty J. W., dan Scott, David R. 2005. *Financial Management: Principles & Application* (10th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Kohlbeck, M. dan B. W. Mayhew. 2010. Valuation of Firms that Disclose Related Party Transactions. *Journal of Accounting and Public Policy*. 29 (2). 115-137.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. dan Vishny, R. 1998. Law and Finance. *Journal of Political Economy*. 106.
- Lestari, Eka dan Murtanto. 2017. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* ISSN 2442-9708 (Online) Vol. 17 No.2 September 2017: 97-116 ISSN 1411 - 8831 (Print) Doi: <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v17i2.2063>
- Mohd, N & Shamsul, Nahar Abdullah. 2005. *Voluntary disclosure and corporate governance among financially distressed firms in Malaysia*. Monash University Malaysia.
- Myers, S. & Majluf, N. 1984. Corporate financing and investing decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*. 13. 187-222.
- Nachrowi, Djalal. & Usman, Hardius. 2005. *Penggunaan Teknik Ekonometri* (edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Nuryaman. 2009. Pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 6(1). 89-112.
- Peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan OJK Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- Prasetyo, Teguh. 2013. Dividen, Hutang dan Kepemilikan Institusional Di Pasar Modal Indonesia: Pengujian Teori Keagenenan. *Jurnal Dinamika Manajemen (JDM)*. Vol. 4, No. 1, 2013, pp: 10-22
- Schroeder, R. G., Clark, M.W., dan Cathey, J. M. 2009. *Financial Accounting Theory and Analysis* (9th ed.). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Utama, C. A. dan S. Utama. 2014. Corporate Governance, Size and Disclosure of Related Party Transactions, and Firm Value: Indonesia Evidence. *International Journal of Disclosure and Governance*. 11 (4). 341-365.
- Utama, C.A. 2015. Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 12 (1). 37-54.
- Utama, S. 2008. *Related Party Transactions*.
- Villalonga, B., dan Amit, R.. 2006. How do family ownership, control, and management affect firm value?. *Journal of Financial Economics*.
- Watts, L. 1977. Corporate financial statements, a product of the market and political processes. *Australian Journal of Management*. p 131.
- Yeh, Y. H., P. G. Shu, dan Y. H. Su. 2012. Related Party Transactions and Corporate Governance: The Evidence from the Taiwan Stock Market. *Pacific-Basin Finance Journal*. 20 (5). 755-776.